

## Application-based Service Problem Reporting Innovation at the Office of Manpower and Transmigration of East Java Province.

### Inovasi Layanan Pelaporan Permasalahan Ketenagakerjaan berbasis Aplikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Ahmad Miftah Fajrin\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Surabaya

\*e-mail: [ahmadmiftah@staff.ubaya.ac.id](mailto:ahmadmiftah@staff.ubaya.ac.id)<sup>1</sup>

#### Abstract

*One of the issues that Indonesia is concerned about is the labor issue. East Java, one of the biggest Indonesia's provinces, employs 3,286,424 people, increasing the likelihood of conflict arising from labor-related concerns. This has been demonstrated during the last three years, as the Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) in the Province of East Java continues to receive a significant number of problem reports. Complainants' problem complaints are frequently regarded as unprocessed by disnakertrans. Although the disnakertrans has processing the report, the reporter cannot access any process status. In order to address these issues, media that can show public reports with updates in the applications for employment grievances are required. The innovation that was created through focus group discussion meetings with disnakertrans was to build an application for complaining about employment problems. The results obtained from the implementation of this service are that the public gives a positive appreciation of the service innovation in the form of an employment reporting application. The outcomes of the application's development allow the community to independently report through the application as well as track the progress of the community's follow-up activities. In sending the follow-up, the application might thereby benefit the reporter and the institution.*

**Keywords:** Labor, Complaint, Application

#### Abstrak

Permasalahan tenaga kerja adalah salah satu masalah yang menjadi concern di Indonesia. Salah satu provinsi terbesar di Indonesia yaitu Jawa Timur mempunyai jumlah tenaga kerja sebanyak 3.286.424 sehingga potensi conflict mengenai permasalahan tenaga kerja atau menjadi lebih besar. Ini terbukti dalam 3 tahun terakhir, laporan permasalahan yang masuk di dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi Jawa Timur masih tinggi. Laporan permasalahan yang dibuat oleh pelapor sering kali dianggap tidak diproses oleh pihak disnakertrans. Namun, pihak disnakertrans sebenarnya sudah memproses laporan yang dibuat akan tetapi tidak ada media yang dapat dilihat oleh pelapor. Dari permasalahan tersebut, diperlukan media yang dapat menampilkan laporan masyarakat dengan status tindak lanjutnya berupa aplikasi pelaporan ketenagakerjaan. Inovasi yang tercipta melalui pertemuan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak disnaker yaitu membangun sebuah aplikasi berupa layanan pelaporan permasalahan ketenagakerjaan. Hasil yang diperoleh dari implementasi layanan ini adalah terlihat masyarakat memberikan apresiasi positif atas inovasi layanan yang berupa aplikasi pelaporan ketenagakerjaan. Aplikasi yang dibangun tidak hanya dapat mengetahui status tindak lanjut yang dilakukan oleh masyarakat akan tetapi masyarakat juga dapat melakukan pelaporan secara mandiri melalui aplikasi. Dengan demikian, aplikasi dapat memberikan dampak positif bagi pelapor dan pihak dinas dalam menyampaikan tindak lanjutnya.

**Kata kunci:** Tenaga Kerja, Pelaporan, Aplikasi

## 1. PENDAHULUAN

Tingkat jumlah tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2020 khususnya Jawa Timur sangat tinggi yaitu sebanyak 3.286.424 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, 2020). Jumlah tenaga kerja yang banyak tersebut tentu memiliki arti penting untuk Jawa Timur.

Tenaga kerja adalah salah satu pelaksana utama dalam pembangunan keberlanjutan (Aqil Fatahillah & Tenri Padang, 2021). Sebagaimana besar sumber pendapatan provinsi di Indonesia adalah pajak (Suhartoyo, 2019). Jawa Timur mempunyai peringkat nomor tiga sebagai provinsi penerima pendapatan sumber pajak tertinggi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Oleh karena itu, tenaga kerja sebagai penyumbang pajak khususnya di provinsi Jawa Timur harus mendapatkan perlindungan dan hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Permasalahan seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), gaji dibawah Upah Minimum Regional (UMR) adalah permasalahan yang sering terjadi oleh tenaga kerja. Perlindungan yang bisa diberikan kepada tenaga kerja jika terjadi perselisihan adalah perlindungan hukum. Salah satu upaya perlindungan hukum adalah setiap warga negara berhak mendapat upah yang layak dan perlakuan adil dalam ruang lingkup pekerjaan serta mencakup pengupahan dan kesejahteraan pekerja anak yang termuat pada pasal 75 UU Ketenagakerjaan (Harefa, 2020). Hak-hak asasi manusia meskipun sudah dilindungi oleh UUD dan telah mendapatkan perlindungan hukum, masih banyak terjadi permasalahan hukum antara pekerja dan instansinya (Budiyo, 2021).

Sebenarnya, tenaga kerja yang mempunyai permasalahan dengan pemberi kerja dapat melaporkannya ke pihak dinas terkait. Pihak terkait dalam lingkup provinsi Jawa Timur jika terjadi permasalahan ketenagakerjaan yaitu Disnakertrans Jawa Timur. Disnakertrans Jawa Timur dapat menerima laporan dari tenaga kerja jika mengalami permasalahan di area Jawa Timur. Permasalahan yang dapat dilaporkan antara lain masalah upah, pembayaran tunjangan hari raya, PHK, status hubungan kerja, *union busting*, kecelakaan kerja, waktu kerja-waktu istirahat, penutupan perusahaan, lembur, jamsostek dan lain sebagainya. Jadi para tenaga kerja dapat mencari keadilan melalui kantor Disnakertrans. Sampai saat ini, untuk melaporkan permasalahan harus datang ke kantor Disnakertrans Jawa Timur. Kemudian, permasalahan tersebut akan diproses oleh tim dari Disnakertrans. Sekitar 100 aduan yang masuk dan sudah dilaporkan pengadu. Aduan yang sedang atau sudah diproses oleh Disnakertrans sering kali tidak tersampaikan oleh pihak pelapor aduan. Ini mengakibatkan pihak pelapor merasa dihiraukan karena tidak ada kabar lanjutan mengenai status aduannya. Selain itu, jika pelapor adalah serikat pekerja dan merasa tidak menerima kabar lanjutan dari aduannya, maka mereka akan melakukan demonstrasi menuntut untuk ditindak lanjuti proses aduannya. Jika banyak aduan yang tidak diselesaikan atau informasi mengenai status pengaduan tidak tersampaikan dengan baik, maka akan terjadi permasalahan baru seperti tidak percaya dengan dinas terkait dan akan terjadi demo di jalan.

Dari permasalahan yang sudah dijabarkan sebelumnya, peneliti melakukan pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan pihak Disnakertrans Jawa Timur. Peneliti bersama Disnakertrans menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil FGD tersebut menghasilkan sebuah inovasi yaitu digitalisasi proses pelaporan ketenagakerjaan berbasis aplikasi. Digitalisasi sebuah proses ke dalam sistem sesuai dengan teori yang diajukan oleh *United National Development Program* (UNDP) mengenai *Good Governance* (Wibawa & Antarini, 2020). Setidaknya ada empat hal penting penerapan *Good Governance* di sektor publik yaitu transparan, efektif, akuntabel, efisien dan partisipan (Ramendra & Kurniawan, 2021). Perubahan transformasi ke digital adalah jaminan agar institusi pemerintahan tidak tenggelam oleh perubahan waktu dan zaman (Firdaus dkk., 2021). Pelaku instansi yang mengikuti perkembangan teknologi maka itu akan menguntungkan instansi tersebut (Endah Dewi Purnamasari dkk., 2022).

Digitalisasi proses pelaporan dilakukan oleh peneliti dengan membuat aplikasi pelaporan berupa website. Efisiensi akan didapatkan jika pelaporan dilakukan *online* dapat memberikan kemudahan dari sisi pelapor maupun staff yang mengenai pelaporan tersebut (Laksono, 2019). Sistem pelaporan berbasis online dapat diakses dimana saja, kapan saja yang sesuai dengan karakteristik *Good Governance*. Pelapor tidak harus datang ke kantor dinakertrans jatim untuk

melaporkan permasalahannya. Tidak hanya itu, pelapor dapat memantau status aduannya melalui aplikasi. Proses transparansi, efisien, akuntabilitas dan partisipasi akan terwujud dengan menggunakan aplikasi pelaporan permasalahan ketenagakerjaan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh peneliti.

## 2. METODE

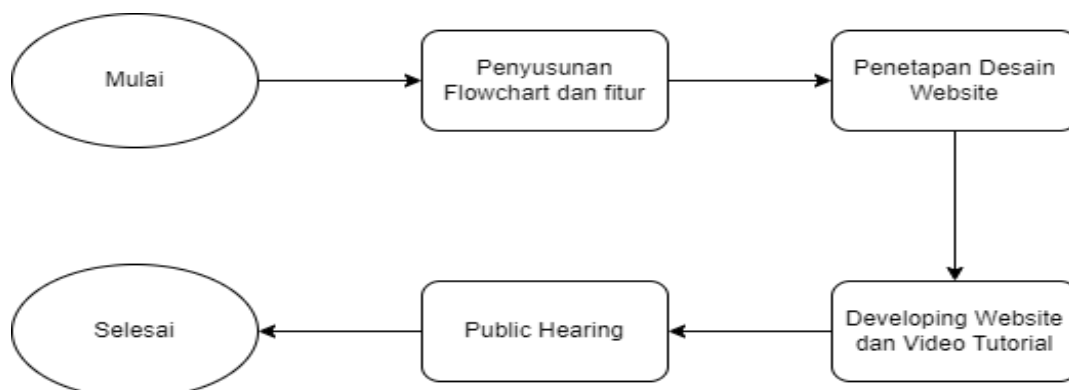
Metode yang dilakukan pada pengabdian masyarakat ini adalah metode analisis deksriptif dalam mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap kejadian yang ada. Pemahaman yang didapatkan berasal dari beberapa pertemuan yaitu pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP), FGD. Pelaksanaan SOP dan FGD dilakukan secara *offline* di kantor disnakertrans. Pihak yang terlibat yaitu peneliti dan dua bidang di disnakertrans jatim. Dua bidang itu adalah Bidang Pengawasan dan Bidang Hubungan Industrial.

Pertemuan pertama yaitu pembahasan SOP untuk mengetahui jalannya proses pelaporan yang saat ini sudah berjalan. SOP berisi dokumen yang menjelaskan intruksi yang harus dilakukan oleh pegawai di lingkungan tempat kerja (Ardiana dkk., 2020). SOP mempunyai peran penting dalam meningkatkan kinerja serta integritas dari pegawai. Maka dari itu dalam pertemuan pertama ini dilakukan Dari pertemuan SOP tersebut ditemukan permasalahan terkait penyampain informasi yang tidak bisa dilakukan dengan cepat dan efisien. Untuk membahasa permasalahan tersebut dilakukan bebera. pa kali FGD. FGD dilaksanakan untuk mencari informasi permasalahan yang didapatkan dan penyelesaiannya. Hasil dari FGD yang dilakukan sebanyak 3 kali adalah inovasi aplikasi pelaporan ketenagakerjaan.

Bahasa pemrograman PHP yang efisien digunakan untuk membangun inovasi aplikasi dengan menggunakan *Framework* Laravel sebagai backend dengan Vue.js sebagai frontend. Penambahan Vue.js dalam aplikasi dapat membuat tampilan aplikasi jadi lebih interaktif (Ketut Aditya Herdinata Putra dkk., 2019) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang didapatkan pada kegiatan pengabdian ini adalah inovasi layanan pelaporan permasalahan aduan ketengakerjaan. Sebelum ada inovasi ini, tenaga kerja yang ingin melakukan aduan harus datang dulu. Setelahnya, pelapor tidak dapat mengetahui status aduannya jika tidak datang dan tidak ditanyakan ke kantor disnakertrans. Sering kali pelapor mengharapkan informasi mengenai statusnya secara cepat. Oleh sebab itu, inovasi layanan pelaporan dalam bentuk aplikasi website ini sangat dibutuhkan. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan beberapa pertemuan setelah dilakukannya pembahasan SOP adalah dapat dilihat pada Gambar 1

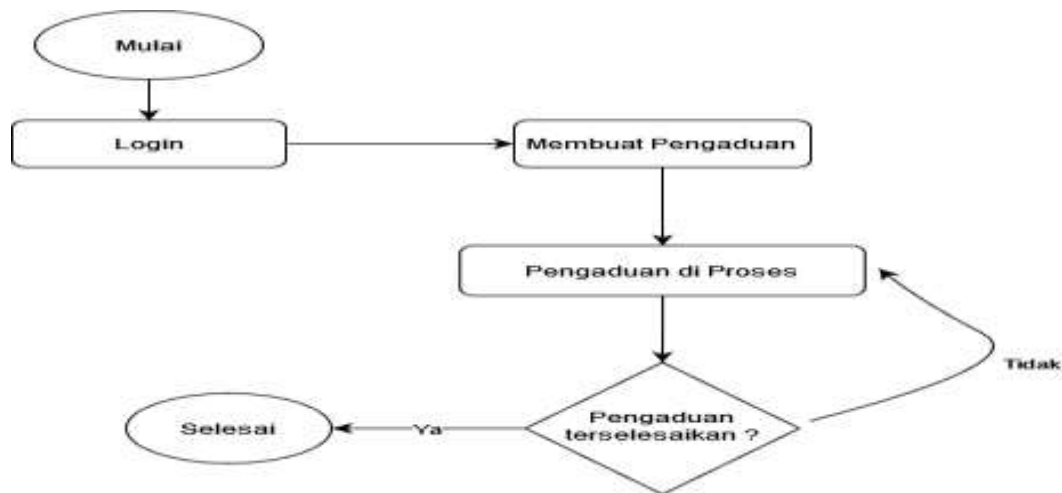


Gambar 1 Alur Proses Kegiatan

Pada kegiatan pengabdian ini, dilakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak disnakertrans. Pertemuan dimulai dengan dilakukannya penyusunan flowchart dan fitur sampai dengan *public hearing*. Pertemuan ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. FGD 1 (Penyusunan Flowchart dan Fitur)

Pada pertemuan FGD 1 ini, dilakukan pembahasan mengenai alur pelaporan sampai proses tindak lanjut yang dilakukan oleh masyarakat maupun sisi internal dari disnakertrans yang diwujudkan dalam bentuk flowchart. Hasil flowchart ini menjadi landasan utama dalam membuat aplikasi website. Flowchart untuk pengaduan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pembuatan Pengaduan

Setiap pelapor yang ingin mengadukan permasalahan harus terdaftar pada aplikasi pelaporan ketenagakerjaan. Setelah terdaftar dan membuat pengaduan, pelapor dapat melihat status tindak lanjutnya. Kegiatan FGD 1 ini dilaksanakan di ruang Disnakertrans Jawa Timur yang ditunjukkan di Gambar 3.



Gambar 3. FGD 1

b. FGD 2 (Penetapan Desain Website)

Pada pertemuan FGD 2 ini membahas penetapan desain website. FGD 2 sangat penting agar aplikasi yang akan dibangun dapat digunakan secara mudah dan tepat sasaran. Pihak disnakertrans juga dapat memberikan pendapat mengenai design yang ditetapkan. Hasil dari design ini ditunjukkan di Gambar 4

### Halaman Pendaftaran Akun

Harap mengisi data pendaftaran dengan benar sesuai identitas diri yang berlaku untuk pendaftaran akun, atau jika telah memiliki akun silahkan klik **masuk ke akun** terdapat di bagian atas, sebelum proses pendaftaran atau memilih pengaduan yang telah di buatkan

Jenis Kelamin  
Pilih Jenis Kelamin

Nama Lengkap

Alamat Kantor  
Pilih Jenis Kantor

Alamat di Rumah

Kata Sandi

Ulangi Kata Sandi

Nomor Telepon

Alamat Domisili

Daftar

(a)

Detail Pengaduan

Profil Pengaduan

| Agensi | Identitas | Tingkat | Identifikasi (Jenis) | Salah |
|--------|-----------|---------|----------------------|-------|
| Agensi | Identitas | Tingkat | Identifikasi (Jenis) | Salah |
| Agensi | Identitas | Tingkat | Identifikasi (Jenis) | Salah |

(c)

### Kategori Pengaduan

Pilih minimal 1 kategori yang berkaitan dengan keluhan:

☐ Tidak ☐ Tidak Berkaitan ☐ Tidak Berkaitan ☐ Lainnya

☐ Pengaduan Tidak ☐ Tidak Berkaitan ☐ Tidak Berkaitan ☐ Lainnya

☐ Pengaduan Tidak Berkaitan ☐ Tidak Berkaitan ☐ Tidak Berkaitan ☐ Lainnya

### Pengelasan Singkat

Isilah dengan kata-kata yang mudah dipahami yang akan di sampaikan

Pengelasan Singkat

### Informasi Pengadu

Isilah dengan nama dan alamat yang benar

Nama Pengadu

Alamat Pengadu

Alamat Pengadu

Alamat Pengadu

### Pihak Terkait

Masukkan nama dan alamat yang berkaitan dengan keluhan yang diajukan

Isilah dengan nama dan alamat yang berkaitan dengan keluhan yang diajukan

Nama Pihak yang Berkaitan

Alamat Pihak yang Berkaitan

Alamat Pihak yang Berkaitan

Alamat Pihak yang Berkaitan

### Lampiran

Isilah dengan foto atau dokumen yang berkaitan dengan keluhan yang diajukan

Isilah dengan foto atau dokumen yang berkaitan dengan keluhan yang diajukan

Isilah dengan foto atau dokumen yang berkaitan dengan keluhan yang diajukan

(b)

Daftar Pengaduan

| No | Agensi | Identitas | Tingkat | Identifikasi (Jenis) | Salah | Detail | Status |
|----|--------|-----------|---------|----------------------|-------|--------|--------|
| 1  | Agensi | Identitas | Tingkat | Identifikasi (Jenis) | Salah | Detail | Status |
| 2  | Agensi | Identitas | Tingkat | Identifikasi (Jenis) | Salah | Detail | Status |
| 3  | Agensi | Identitas | Tingkat | Identifikasi (Jenis) | Salah | Detail | Status |
| 4  | Agensi | Identitas | Tingkat | Identifikasi (Jenis) | Salah | Detail | Status |

(d)

Gambar 4. Desain Website (a) Pendaftaran Akun (b) Buat Pengaduan (c) Detail Pengaduan (d) Daftar Pengaduan

Sesuai dengan SOP, pelapor wajib melakukan registrasi akun pada halaman aplikasi. Gambar 4 (a) menunjukkan halaman pendaftaran akun. Pelapor harus mengisi data seperti nama, nomor identitas, email, kata sandi, nomor telepon dan alamat domisili. Data ini diperlukan agar pihak disnakertrans tidak kesulitan untuk proses validasi pelapor. Validasi pelapor diperlukan agar pelapor bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Ini diperlukan agar pihak disnakertrans mengetahui secara pasti siapa pelapor dan apakah pelapor memang benar



mengalami masalah di tempat kerjanya. Pada Gambar 4 (b) terdapat isian yang harus diisi oleh pelapor. Mulai dari pengisian kategori pelaporan, penjelasan singkat, informasi pelapor, pihak terkait yang diadukan, dan upload lampiran atau berkas yang mungkin diperlukan. Setelah pelaporan selesai dibuat, pelapor dapat melihat riwayat tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak disnakertrans jatim yang terlihat pada Gambar 4 (c). Gambar 4 (a – c) adalah halaman yang dapat dilihat oleh masyarakat. Untuk Gambar 4 (d) adalah halaman yang hanya dapat dilihat oleh pihak internal disnakertrans provinsi Jawa Timur.

Sebelum ada aplikasi ini, pihak disnakertrans hanya mengandalkan dokumen laporan fisik yang masuk dari pelapor. Untuk melihat sampai mana dokumen itu diproses, bidang terkait melihat nota disposisi fisik dan chat dari whatsapp dari bidang yang terlibat. Ini menyulitkan dalam penyampaian informasi ke pimpinan seperti dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan gubernur jawa timur karena tidak adanya *field report* yang dapat dilihat secara mudah dan status terakhir dari tindak lanjut laporan yang masuk. Maka dari itu, inovasi aplikasi ini juga mencakup dari sisi internal disnakertrans jatim. Pihak disnakertrans dapat melihat laporan pengaduan yang masuk melalui aplikasi. Data pengaduan yang masuk dapat dilihat juga mengenai status pengaduan yang sudah diproses pada Gambar 4 (d).

Pertemuan yang menghasilkan desain website ini dilakukan di ruang Disnakertrans Provinsi Jawa Timur ditunjukkan di Gambar 5.



Gambar 5. FGD 2

#### c. FGD 3 (*Developing Website dan Video Tutorial*)

Pada FGD 3 ini tetap dilakukan pada ruang Disnakertrans provinsi Jawa Timur. Pertemuan ini dihadiri dua bidang yaitu Bidang Hubungan Industrial dan Bidang Pengawasan. Kepala bidang beserta jajaran hadir dalam FGD 3 ini. FGD 3 ini dilakukan *sharing* pendapat dari staff internal disnakertrans. *Sharing* ini dilakukan ketika aplikasi sudah selesai dan tahap konfirmasi ke staff internal. Selain itu, video tutorial juga ditunjukkan pada staff internal. Video tutorial juga dibuat agar masyarakat yang ingin melaporkan permasalahan dan mendapat kesulihat dalam menggunakannya dapat melihat tutorial penggunaan aplikasi. Pertemuan ini ditunjukkan di Gambar 6.



Gambar 6. FGD 3

#### d. Public Hearing

Kegiatan terakhir dalam pengabdian masyarakat ini adalah *public hearing* aplikasi. *Public hearing* dilakukan untuk mensosialisasikan aplikasi pengaduan ini ke masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat memberikan pendapat dan pertanyaan terkait inovasi aplikasi yang sudah dilakukan. Pada kegiatan *public hearing* ini, dihadiri oleh kepala dinas disnakertrans provinsi Jawa Timur beserta jajarannya. Masyarakat juga diundang untuk hadir dalam *launching* ini. Untuk kegiatan *public hearing* dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Public Hearing

Peserta yang hadir juga dapat memberikan komentar dan saran terkait sistem yang akan digunakan ini. Menurut peserta dari sisi pekerja, sistem ini dapat membantu pelapor dalam pengaduan permasalahan yang terjadi tanpa harus datang ke Dinas. Selain itu, terdapat pemantauan status yang sangat membantu dalam memantau kasus yang sedang dihadapinya. Masyarakat juga telah memberikan apresiasi positif atas inovasi layanan ini. Selain itu, dari pihak Disnakertrans mengatakan bahwa sistem ini dapat mempercepat proses pengaduan terutama alur komunikasi antar staff yang mengenai pengaduan itu. Yang sebelumnya menggunakan *mobile phone* untuk berkomunikasi antar staff, sekarang cukup dengan menggunakan sistem dapat memantau dan memproses laporan dengan cepat dan transparan.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan untuk pengabdian masyarakat ini memberikan solusi untuk permasalahan yang terjadi di disnakertrans jatim. Permasalahan terkait tidak tersampainya status terakhir mengenai pengaduan yang dilaporkan oleh pelapor akan teratasi ketika menggunakan aplikasi ini. Inovasi aplikasi pengaduan ini sangat bermanfaat bagi disnakertrans yang sesuai dengan karakteristik *Good Governance* yaitu transparansi, efektifitas, akuntabilitas, efisien serta partisipasi. Transparansi dicapai ketika pelapor dapat melihat status terakhir tindak lanjut pengaduan. Efektifitas dicapai ketika pelapor dapat melihat status dari mana saja, kapan saja dan tidak harus datang ke kantor disnakertrans. Akuntabilitas dicapai ketika pengaduan dibuat dan pihak disnakertrans bertanggung jawab penuh untuk memproses pengaduan tersebut. Efisien dicapai dalam hal penyampaian informasi dengan mudah dan cepat. Partisipasi dapat dicapai dari sisi pelapor dan disnakertrans saling bekerjasama dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Kegiatan pengabdian ini diberakhir sampai dengan proses *public hearing*. Akan tetapi, inovasi layanan pelaporan ini akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada dan jika terjadi perkembangan situasi yang membutuhkan penyesuaian, maka tim peneliti akan membantu pihak disnakertrans untuk menyelesaikan penyesuaian tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kedai Reka dalam program pendanaan Matching Fund 2022 dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Surabaya dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur yang membantu penulis untuk kelancaran program pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aqil Fatahillah, M., & Tenri Padang, A. (2021). Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Siyasatuna*, 2(2), 402–213.
- Ardiana, I. D. K. R., Andjarwati, T., & Wulandari, A. D. (2020). Analysis of the Implementation of Standard Operating Procedure, Organizational Citizenship Behaviour and Work Competency Towards Productivity and Employees Performance of Surabaya Merchant Marine Polytechnic. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 7(2), 28–36. <https://doi.org/10.30996/jmm17.v7i2.4559>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020*.
- Budiyono, T. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak dan Outsourcing, Serta Problematika Implementasinya. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p145-160>
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. (2020). *Data Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur*.
- Endah Dewi Purnamasari, Anggraini, L. D., Faradillah, F., & Jinal, J. (2022). Pentingnya E-Commerce Pada Pelaku Usaha Kerupuk Kemplang Lembak. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(6), 1511–1516. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i6.11751>
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 226–239.
- Harefa, G. M. (2020). Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja di Bawah Umur. *Journal Education and Development*, 8(2), 205–207.
- Ketut Aditya Herdinata Putra, I., Pramana, D., & Luh Putri Srinadi, N. (2019). Sistem Manajemen Arsip Menggunakan Framework Laravel dan Vue.js (Studi Kasus: BPKAD Provinsi Bali). *Jurnal Sistem dan Informatika*, 13(2), 97–104.
- Laksono, S. (2019). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaporan Tenaga Kerja dengan Menggunakan Sistem Manual dan Sistem Online (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik). *Jurnal Manajerial*, 5(2), 40–50.
- Ramendra, J., & Kurniawan, P. S. (2021). Evaluasi Penerapan Good Governance pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 127. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.28294>
- Suhartoyo. (2019). 5096-15423-1-SM. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(2), 326–336.
- Wibawa, I. G. A., & Antarini, L. (2020). Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government) I Gede Agus Wibawa dan Lilik Antarini. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 57–71. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>